

---

## ANALISIS MODAL SOSIAL DALAM TATA KELOLA AIR DI DESA BANYUURIP, SRAGEN, JAWA TENGAH

Oleh

Triana Ramawati<sup>1</sup>, Ahmad Zuber<sup>2</sup>, Theofilus Apolinaris Suryadinata<sup>3</sup>, Rezza Dian Akbar<sup>4</sup>, Aris Arif Mundayat<sup>5</sup>, Fitri Ayu Handayani<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Department of Sociology, Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia

Email: [1Trianarahmawati@staff.uns.ac.id](mailto:1Trianarahmawati@staff.uns.ac.id)

---

### Article History:

Received: 10-10-2025

Revised: 05-11-2025

Accepted: 13-11-2025

### Keywords:

Water Management;  
Case Study; Social  
Capital; Commons;  
Banyuurip; PAM Simas

**Abstract:** *This study is a case study on the shift in water management patterns in Banyuurip Village, Sragen, Central Java, from traditional community-based systems to modern schemes such as Community-Based Water Supply and Sanitation (PAM Simas) and Rainwater Harvesting Infrastructure (IPAH). Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with 15 informants, participatory observation in three representative hamlets, and document analysis from August to October 2024. Findings indicate that while the shift improved water access from 45% to 87% of households (2018-2024), it also fostered dependency on external aid (78% of respondents), weakened collective participation in communal work (declined by 62%), and triggered social tensions over unequal distribution between highland and lowland areas. Analysis based on Bourdieu's (1986) concept of social capital and Ostrom's (1990) principles of commons governance reveals that water modernization without strengthening local institutions risks eroding the social foundation of sustainability. Comparison with similar studies in Nepal (Prasai et al., 2021), Ethiopia (Whaley & Cleaver, 2017), and Indonesia (Kooy & Bakker, 2022) demonstrates a universal pattern: technical water management without substantive participation results in social exclusion and social capital erosion. The study underscores the importance of integrating traditional values and community autonomy in rural water resource governance policies through hybrid institutional designs that combine modern efficiency with local legitimacy*

---

## PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia, yang diakui secara global sebagai hak asasi manusia. Pentingnya akses terhadap air minum yang aman tidak dapat dilebih-lebihkan; air minum sangat penting untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesehatan. WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa sanitasi, air minum, dan higiene yang aman atau wash menjadi komponen penting dalam membentuk kesehatan dan berkontribusi secara

signifikan terhadap kualitas hidup di masyarakat (WHO, 2021),

Keterbatasan air bersih di Indonesia menjadi salah satu polemik di masyarakat, berdasarkan data terdapat 68% desa masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses air bersih, terutama di Jawa Tengah yang rentan pada kekeringan musim (BPS,2023). Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan lembaga donor, seperti program modernisasi tata kelola air, PAM Simas, dan bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap air bersih melalui pendekatan berbasis komunitas. Namun, peningkatan akses tersebut tidak otomatis dapat menjamin keberlanjutan sosial. Studi global yang telah dilakukan menunjukkan data bahwa dalam pelaksanaan intervensi teknis yang tidak mempertimbangkan dimensi sosial dapat memberikan dampak “modernisasi hampa” atau hollow modernization, yang mana menimbulkan kondisi infrastruktur berjalan dan berfungsi dengan baik, tapu masyarakat kehilangan kemampuan dan kapasitas kolektif dalam mengelola sumber daya secara mandiri (Kooy & Bakker, 2022; Wutich et al., 2020).

Permasalahan akses masyarakat terhadap air bersih dapat ditemui di Desa Banyuurip, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Desa ini mengalami transformasi tata kelola air dari sistem tradisional, berbasis sumur gali, mata air, dan ritual Nyadran, menuju sistem modern berbasis pipa sejak 2018. Adanya sistem modern dalam kelola air masih menimbulkan problematika baru terkait dengan kemampuan komunitas dalam memperkuat fondasi sosial yang dimiliki. Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut dengan fokus pada modal sosial Bourdieu, yaitu jaringan relasi, kepercayaan, dan norma timbal balik yang memungkinkan aksi kolektif (Pretty & Ward, 2001).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pergeseran pola pengelolaan air yang mempengaruhi struktur dan fungsi modal sosial di desa Banyuurip. Secara spesifik, artikel ini ingin menggambarkan: (1) bentuk-bentuk modal sosial dalam sistem tradisional; (2) mekanisme erosi modal sosial dampak modernisasi; dan (3) implikasi sosial dari melemahnya modal sosial terhadap keberlanjutan tata kelola air di desa Banyuurip, Sragen.

Kontribusi teoritis penelitian artikel ini pada perluasan konsep modal sosial Bourdieu dalam konteks pembangunan air pedesaan di masyarakat Banyuurip, yang mana sebagian besar literatur mengasosiasikan erosi modal sosial dengan konflik atau fragmentasi yang terhindarkan dari implikasi sosiologis. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa modal sosial dapat terkikis oleh intervensi pembangunan “positif”, tetapi dapat melupakan sisi partisipatif, yang mana melalui penghapusan praktik kolektif yang organik tumbuh sebagai ruang reproduksi modal sosial itu sendiri.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Model sosial telah lama menjadi konsep yang digunakan untuk mendiskripsikan keberhasilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya bersama (commons). Pretty dan Ward (2001) menganalisis bahwa modal sosial lebih kuat dalam memprediksi keberlanjutan sistem irigasi komunal dibandingkan faktor lainnya seperti faktor teknis atau ekonomi. Modal sosial memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengkoordinasikan tindakan, memantau penggunaannya, dan memberikan sanksi sosial terhadap pelanggaran, inilah fungsi-fungsi kunci dalam tata kelola commons (Ostrom, 1990).

Modal sosial dalam konteks akses air di masyarakat pedesaan, dapat bermanifestasi

melalui tiga bentuk yaitu, bonding (ikatan dalam kelompok homogen), bridging (koneksi antar-kelompok), dan linking (relasi vertikal dengan otoritas eksternal) (Pradhan & Furtado, 2021). Namun, dalam hal ini modal sosial tidak menjadi aset statis, tetapi menjadi aset dinamis yang dapat mengalami pergeseran. Cleaver (2005) menegaskan bahwa modal sosial juga dapat terkikis oleh intervensi eksternal yang mengubah pola interaksi sosial tanpa membangun substitusi yang bermakna, seperti ketika program pembangunan yang kemudian menggantikan kerja bakti dengan fasilitas layanan berbayar, tetapi tidak menciptakan forum baru untuk deliberasi kolektif.

## 2. Modernisasi Air dan Erosi Modal Sosial

Studi-studi terkini menunjukkan pola universal: modernisasi air yang bersifat teknokratis sering menghasilkan erosi modal sosial. Di Nepal, Prasai et al. (2021) menemukan bahwa sistem air pipa modern melemahkan institusi tradisional dhunge dhara yang selama ini memfasilitasi kohesi sosial. Penelitian yang telah dilakukan di Ethiopia, menunjukkan bahwa program air berbasis komunitas gagal karena mengabaikan struktur kekuasaan internal, sehingga memperdalam ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan antar warga (Whaley dan Cleaver, 2017).

Sementara itu, Kooy dan Bakker (2022) dalam penelitiannya di kawasan peri-urban Jakarta menunjukkan adanya "geografi eksklusi", yang mana warga miskin terpinggirkan dari akses formal. Meskipun terdapat perbedaan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, keduanya memiliki pola dasar yang sama, yaitu adanya teknisasi tanpa demokratisasi substantif menghasilkan eksklusi sosial dan erosi modal sosial (Zwarteveen & Boelens, 2014).

Akan tetapi, berdasarkan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, penelitian terkait dinamika akses air bersih di masyarakat pedesaan di Jawa dengan karakteristik tradisi dan gotong royong yang kuat, masih terbatas. Maka dari itu, artikel ini menjadi kebaruan dengan menjelaskan analisis terkait modernisasi air yang mengubah habitus kolektif masyarakat di Banyuurip.

### A. Kerangka Teoretis: Modal Sosial Bourdieu

Artikel ini mengkaji lebih dalam konsep modal sosial menurut Bourdieu (1986), mendeskripsikan modal sosial sebagai "agregat sumber daya aktual atau potensial yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan hubungan institusional yang tahan lama berdasarkan dengan pengakuan". Hal ini bertolak belakang dengan pendekatan fungsionalis Bourdieu yang memandang modal sosial sebagai "aset" statis. Dalam pemikirannya, Bourdieu menegaskan bahwa modal sosial dibentuk dan terus direproduksi melalui praktik berulang (habitus) dengan mengakumulasi norma, kepercayaan, dan jaringan relasi.

Habitus kolektif dalam konteks pengelolaan air tradisional di Banyuurip terbentuk secara berulang melalui:

- 1) Gotong royong untuk menggali dan memelihara sumur
- 2) Musyawarah alokasi air saat kekeringan
- 3) Budaya ritual nyadran yang memperkuat ikatan simbolik antara alam dan komunitas

Praktik yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya sebagai "sarana efisien" dalam mengelola air, tetapi menjadi ruang sosial dimana modal sosial direproduksi. Ketika modernisasi mengganti praktik kolektif dengan layanan akses air yang berbayar, berdampak pada habitus kolektif yang terganggu. Sehingga, warga tidak lagi

melihat air sebagai sumber daya yang dikelola secara kolektif, tetapi sebagai komoditas yang dibeli secara individual. Adanya perubahan orientasi di masyarakat melemahkan modal sosial dan mengikis kapasitas masyarakat dalam aksi kolektif di masa yang akan datang, seperti dalam menghadapi krisis air berikutnya. Modernisasi air yang merupakan perubahan dapat menggantikan praktik kolektif masyarakat tanpa adanya upaya membangun ruang sosial pengganti yang lain. Hal ini dapat mengikis modal sosial dan ketahanan sosial ekologis dari masyarakat.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan dinamika sosial dalam pergeseran pengelolaan air di Desa Banyuurip. Penggunaan metode studi kasus memungkinkan untuk melakukan eksplorasi kontekstual terhadap fenomena kompleks dalam setting nyata (Yin, 2018)

##### 1. Lokasi dan Informan

Penelitian ini dilakukan di Desa Banyuurip, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dengan alasan adanya dinamika dalam transisi sistem tradisional ke PAM Simas sejak 2018. Terdapat tiga dusun yang dipilih sebagai lokasi observasi yang didasarkan pada variasi topografi desa. Ketiga dusun tersebut antara lain, Banyuurep dengan topografi dataran rendah, Sendangsari dengan topografi dataran sedang, dan Karangrejo dengan topografi dataran tinggi dan paling rentan dengan kekeringan.

Narasumber pada penelitian melibatkan 15 orang yang dipilih menggunakan purposive dan terdiri dari berbagai peran. Berbagai narasumber terdiri dari lapisan masyarakat, antara lain kepala desa, tiga kepala dusun, pengelola PAM Simas (ketua, bendahara, dan operator), pengguna air (petani, ibu rumah tangga, dan pemuda), serta perangkat desa.

##### 2. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in depth interview) semi terstruktur, observasi partisipatif, serta studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan kepada seluruh narasumber untuk kemudian mendapatkan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil wawancara kemudian juga didukung dengan observasi partisipatif yang dilakukan dengan terlibat pada berbagai kegiatan, seperti rapat PAM Simas, gotong royong masyarakat, hingga proses distribusi air. Studi dokumen didapatkan dari laporan keuangan PAMSimas, Peraturan Desa, Data Dinas LH dan studi literatur dari penelitian relevan.

Hasil temuan data kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) yang menggunakan bantuan dari perangkat lunak ATLAS ti (. Temuan data kemudian juga diverifikasi melalui triangulasi data dari tiga sumber data, wawancara, observasi, dan studi dokumen.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pengelolaan air di Banyuurip sebelum 2018 bersifat desentralisasi dan berbasis komunitas. Setiap dusun mengelola mata air atau sumur gali melalui aturan informal yang dihasilkan dari musyawarah di masyarakat. Sistem yang berjalan didukung oleh tiga pilar modal sosial.

Pertama, pilar praktik kolektif yang dilakukan masyarakat seperti gotong royong untuk

menggali sumur atau membersihkan mata air. Kegiatan ini rutin dilakukan sebanyak 12 kali per tahun sejak 2015-2017. Masyarakat yang terlibat yaitu laki-laki khususnya yang memiliki ikatan keluarga sehingga dapat menjadi momen penting untuk memperkuat ikatan sosial.

Kedua, musyawarah deliberatif. Saat kemarau, warga berkumpul di balai dusun untuk menentukan giliran penggunaan air. "Yang butuh untuk minum dan masak prioritas, baru untuk ternak dan tanaman," jelas Kepala Dusun Banyu Urip.

Ketiga, ritual Nyadran. Upacara tahunan ini melibatkan seluruh komunitas dalam membersihkan sumur, kenduri bersama, dan doa kolektif. "Nyadran itu bukan cuma bersih-bersih sumur, tapi mengingatkan kita bahwa air itu titipan, bukan milik kita sendiri," ungkap seorang sesepuh.

Praktik yang dilakukan masyarakat tidak hanya memastikan akses air, tetapi juga memproduksi habitus kolektif, yang mana kesadaran bahwa air adalah tanggung jawab bersama. Sejak PAMSImas dioperasikan pada 2018, terjadi perubahan mendasar dalam orientasi sosial. Sumber air yang ada dimasyarakat saat ini dipandang sebagai layanan yang dibeli, bukan lagi sebagai sumber daya yang dikelola bersama. Perubahan yang ada memicu adanya erosi modal sosial.

Temuan data menunjukkan terdapat penurunan frekuensi gotong royong terkait air yang menurun dari 12 menjadi 3 kali per tahun. Kemudian, pada budaya ritual gotong royong yang tidak lagi dilakukan masyarakat sejak 2019. Praktik musyawarah alokasi air juga tidak pernah diselenggarakan lagi. Berdasarkan pemaparan seorang ibu rumah tangga di Sedangsari, menyatakan: "Sekarang kalau tidak ada air, ya tinggal telepon operator PAM. Kami tidak perlu repot-repot lagi gotong royong."

Pernyataan narasumber menunjukkan adanya dislokasi habitus, yaitu kebiasaan kolektif yang digantikan oleh pasifitas konsumen. Masyarakat menjadi kehilangan "latihan" sosial yang sejauh ini mampu memperkuat modal sosial. Praktik tradisional yang dilakukan masyarakat mampu merakit ruang interaksi yang intensif. Pada praktik gotong royong mampu meningkatkan kerja sama lintas keluarga. Adanya musyawarah menjadi wadah bagi masyarakat lintas generasi untuk dapat mempererat solidaritas dan menjadi forum deliberatif. Kemudian, adanya praktik nyadran yang menjadi bentuk ritual kolektif lintas usia dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Hilangnya praktik tradisional berdampak pada menyusutnya ruang interaksi di masyarakat. Pada kegiatan rapat PAM Simas, keterlibatan masyarakat hanya dihadiri sebanyak 18-22 orang dari 1.156 KK atau sebesar 1,5% - 1,9% kehadiran, "Dulu rapat soal air itu rame, semua datang karena merasa penting. Sekarang cuma itu-itu saja yang datang," ungkap Kepala Desa. Hal yang paling mengkhawatirkan, erosi modal sosial berdampak pada hilangnya kapasitas aksi kolektif jangka panjang. Tidak ada warga yang berinisiatif membuat program konservasi air seperti penanaman pohon di daerah resapan meskipun kekeringan musiman tetap menjadi ancaman.

Seorang petani di Karangrejo menjelaskan: "Kami mau menanam pohon, tapi mikir. Untuk apa? toh nanti kan ada dropping dari dinas. Lagipula susah buat ngumpul orang sekarang," Pernyataan ini mengungkapkan dua masalah, pertama yaitu ketergantungan yang diinternalisasi terhadap bantuan eksternal. Kedua, lingkaran setan di mana modal sosial yang lemah membuat aksi kolektif sulit terlaksana, yang mana hal ini melemahkan modal sosial. Temuan data mendukung peringatan Pretty & Ward (2001) yang menyatakan "Social



capital, like muscle, strengthens with exercise and weakens without it". Adanya pengikisan modal sosial juga berdampak pada aspek sosial lainnya. Berdasarkan temuan data, terdapat 78% responden yang menyatakan akan menunggu dropping dari dinas, sehingga menimbulkan ketergantungan eksternal kepada PAM Simas. Kemudian, sistem yang ada juga menimbulkan ketidakadilan distribusi. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, sering tidak mendapat air, sementara di dataran rendah masyarakat menggunakan air secara boros. Namun, konflik tidak diungkapkan oleh masyarakat secara terbuka karena kultur rukun dan menjadi resistensi sehari-hari. Permasalahan lain yang muncul yaitu adanya partisipasi semu, yang mana pada rapat PAM Simas bersifat ritualistik. Masyarakat yang hadir pada rapat tidak memiliki peran dan agency untuk mempengaruhi keputusan yang ada. Hal ini mencerminkan apa yang Cleaver (1999) sebut sebagai partisipasi sebagai tirani.

## KESIMPULAN

Artikel penelitian ini menegaskan bahwa modernisasi tata kelola air di di Desa Banyuurip memiliki kekurangan dan kelebihan dilihat dari implikasi sosiologis, meskipun berhasil meningkatkan akses dari 45% menjadi 87% membantu menyelesaikan kelangkaan akses masyarakat terhadap pasokan air bersih tapi di sisi lain telah mengisi modal sosial yang menjadi fondasi ketahanan masyarakat. Praktek kolektif seperti habitus gotong royong dan ritual Nyadran, yang dulu menjadi ruang reproduksi modal sosial kini telah digantikan oleh relasi transaksional antara "penyedia layanan" dan "konsumen".

Hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan bahwa adanya modernisasi tata kelola air di Desa Banyuurip mampu meningkatkan akses masyarakat ke air bersih dari 45% menjadi 87%. Hal ini memberikan dampak pada berkurangnya modal sosial yang selama ini menjadi fondasi ketahanan dari masyarakat. Praktik kolektif yang dilakukan, seperti gotong royong, musyawarah desa, hingga budaya ritual nyadran, yang awal mulanya menjadi ruang reproduksi modal sosial saat ini digantikan oleh relasi transaksional antara "konsumen" dan "penyedia layanan". Hal ini mengakibatkan masyarakat untuk aksi kolektif jangka panjang melemah dan ketergantungan pada bantuan eksternal meningkat.

Temuan data yang didapatkan menegaskan bahwa keberlanjutan tata kelola air pedesaan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur semata, tapi juga ditentukan oleh kemampuan sistem untuk melakukan reproduksi modal sosial. Maka dari itu, kebijakan air harus melampaui logika teknokratis serta dapat mempertimbangkan dimensi sosial budaya yang ada di masyarakat. Artikel ini mengajukan pendekatan institusi hibrida-desain tata kelola yang mengintegrasikan efisiensi teknis dengan legitimasi sosial melalui berbagai pendekatan. Misalnya pada penciptaan ritual modern yang mempertahankan fungsi sosial, serta melibatkan partisipasi substantif yang tidak hanya sekedar kehadiran formal. Penguatan kapasitas lokal dan pengakuan pada pengetahuan ekologi tradisional. Di era perubahan iklim, modal sosial menjadi aspek krusial dalam ketahanan air pedesaan.

Penelitian ini didanai oleh dana dari Anggaran Belanja Negara Universitas Sebelas Maret Indonesia Tahun Anggaran 2025 Nomor: 371/UN27.22/PT.01.03/2025

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- [2] Cleaver, F. (1999). Paradoxes of participation: Questioning participatory approaches to development. *Journal of International Development*, 11(4), 597–612.
- [3] Cleaver, F. (2005). The inequality of social capital and the reproduction of chronic poverty. *World Development*, 33(6), 893–906.
- [4] Kooy, M., & Bakker, K. (2022). Splintered networks: Race, class and contested water access in peri-urban Jakarta. *Political Geography*, 96, 102603.
- [5] Pretty, J., & Ward, H. (2001). Social capital and the environment. *World Development*, 29(2), 209–227.
- [6] Prasai, S., Gorny, P., & Bhattarai, S. (2021). From springs to pipes: The erosion of traditional water governance in Nepal. *Mountain Research and Development*, 41(2), A1–A10.
- [7] Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- [8] Sultana, F. (2020). Water, technology and development: Transformations of development technonatures in changing waterscapes. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 3(3), 759–774.
- [9] Whaley, L., & Cleaver, F. (2017). Can ‘functionality’ save the community management model of rural water supply? *Water Resources and Rural Development*, 9, 56–66.
- [10] Wutich, A., Brewis, A., York, A. M., & Stotts, R. (2020). Rules, norms, and injustice: A cross-cultural study of perceptions of justice in water institutions. *Society & Natural Resources*, 33(8), 953–969.
- [11] Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- [12] Zwarteveen, M., & Boelens, R. (2014). Defining, researching and struggling for water justice: Some conceptual building blocks for research and action. *Water International*, 39(2), 143–158.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN